

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Aristoteles merupakan salah seorang filsuf klasik yang mengembangkan dan mempromosikan ide politik dalam tulisan-tulisan etika dan politik. Dia yakin bahwa politik memainkan peranan sangat sentral dalam kehidupan bersama. Dia mengembangkan lebih lanjut ide Yunani klasik dengan menunjukkan politik pada kehidupan *polis*¹ sebagai suatu keseluruhan.

Aristoteles menunjukkan bahwa aktivitas politis berkaitan dengan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Dalam hal tersebut dituntut peran serta warga negara dalam kegiatan *polis*. Peran warga negara dalam politik adalah sesuatu yang sentral. Baginya, *polis* merupakan komunitas politik yang dikonstruksikan dalam ruang relasi antara yang satu dan yang lain. Karena alasan tersebut, Aristoteles memberikan batasan tentang manusia sebagai makhluk politik atau *zoon politikon*.²

¹ *Polis* merupakan negara kecil atau suatu negara-kota pada masa Yunani Kuno, tetapi serentak juga menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam negara-kota. *Polis* merupakan pusat segala keaktifan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan religius. Ciri-cirinya, otonomi, swasembada, dan kemerdekaan. K. BERTENS, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta 1999, 25.

² Ungkapan yang dilontarkan oleh Aristoteles (*zoon politikon*) ini diterjemahkan dalam terminologi modern yakni, “manusia adalah makhluk sosial”, atau manusia adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. *Ibid*, 200.

Manusia menurut kodratnya merupakan *zoon politicon* atau makhluk yang hidup dalam *polis*.³ Manusia selalu membutuhkan satu sama lain. Hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan tetapi terjadi secara alamiah. Hanya manusia yang dapat hidup dalam *polis*. Semua manusia yang hidup dalam *polis* adalah makhluk politik karena dengan kemampuan akalnya yang rasional mampu mempertimbangkan dan memutuskan dari tindakan-tindakannya. Jelas bahwa bagi Aristoteles, manusia hanya menjadi manusia apabila hidup dalam negara atau *polis*.

Sebagai makhluk politik, manusia secara alamiah cocok dengan kehidupan di sebuah *polis*. Manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan mengembangkan semua kemampuannya. Warga negara yang hidup dalam *polis* bekerja bersama demi kemajuan dan keberlangsungan eksistensinya. Dari awal manusia memiliki dorongan politis yang menggerakkan mereka ke arah kehidupan bersama. Kecenderungan ini ada pada semua manusia sejak lahir.

Bagi Aristoteles, politik adalah cetusan kesempurnaan kodrat sosialitas, rasionalitas sekaligus moralitas manusia. Yang dimaksud kesempurnaan ialah kemanusiawian. Untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi, harus perlu mengintegrasikan dirinya dalam tata kelola hidup bersama. Tata kelola bersama merupakan keseluruhan kodrat manusia. Artinya bahwa untuk menjadi manusia yang manusiawi harus mengintegrasikan dirinya dalam tata kelola hidup bersama.⁴ Manusia dengan segala kesanggupannya ketika dia mencapai tujuan

³ *Ibid.*

⁴ ARMADA RIYANTO, *Berfilsafat Politik*, Kanisius, Yogyakarta 2011, 15.

utamanya (kebahagiaan bersama) dalam *polis*, martabatnya menjadi lebih tinggi dari segala makhluk lain. Oleh karena itu, *polis* harus ditata dengan bijaksana sehingga kehidupan yang baik dapat diwujudkan, dan kebahagiaan sebagai cita-cita dapat tercapai.

Kegiatan berpolitik adalah khas manusia. Aristoteles melihat bahwa berpolitik merupakan puncak kesosialan manusia dan kesosialan merupakan ciri khas manusia. Sosial bagi Aristoteles berarti lebih daripada sekedar kerja sama. Hidup sosial berarti bekerja sama berdasarkan diskursus rasional bersama, pertimbangan, dan debat dalam kesadaran kritis. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu selalu hidup dalam komunitas dalam kebersamaan.⁵

Tidak ada satu pun manusia yang hidup tanpa komunitas. Identitasnya sebagai manusia, termasuk kediriannya, pun diberikan oleh komunitas tempat ia hidup dan berkembang. Ada hubungan timbal balik antara manusia dan komunitasnya. Di satu sisi, manusia menciptakan komunitasnya. Di sisi lain, ia pun diciptakan oleh komunitasnya. Dengan demikian, dorongan untuk menciptakan tata politik, yakni sebagai manusia politis adalah kodrat alamiah manusia.

Aristoteles memandang bahwa setiap *polis* (negara) merupakan suatu persekutuan hidup. Persekutuan hidup yang paling tinggi adalah persekutuan

⁵ FRANZ MAGNIS SUSENO, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta 2009, 30.

hidup politis yang berbentuk *polis* (negara kota).⁶ Pandangan tersebut berbeda dengan kaum sofis yang memandang negara semata-mata sebagai instrumen. Negara dijadikan sebagai sarana atau mekanisme yang digunakan manusia untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya.⁷

Aristoteles mau menegaskan bahwa negara bukan semata sebagai sarana saja seperti dalam pandangan kaum Sofis. Negara baginya, merupakan persekutuan hidup yang menunjukkan adanya suatu keterhubungan yang bersifat organik antara warga negara satu dengan lainnya. Dengan kata lain negara adalah suatu organisme. Ada saling keterhubungan antar bagian-bagian dalam organisme tersebut.⁸

Negara juga merupakan persekutuan hidup politis selalu terkait dengan orang lain yang berada dalam satu *polis* (negara kota), yang disebut sebagai warga negara. Sebagai warga negara harus merawat dan memelihara keakraban, kemesraan dan kelestarian hubungan mereka satu sama lainnya sebagai warga dari persekutuan hidup politis itu.⁹ Negara merupakan persekutuan hidup politik yang berada di jenjang yang paling tinggi dan paling berdaulat di antara seluruh bentuk persekutuan hidup yang ada.

Negara merupakan bentuk persekutuan paling akhir dalam perkembangan persekutuan hidup manusia. Negara juga merupakan bentuk persekutuan paling tinggi karena ia memiliki tujuan yang paling tinggi, paling mulia dan paling luhur.

⁶ ARISTOTLE, *The Politics*, 1252a1, diterjemahkan oleh, T. A. Sinclair, Penguin Books, London 1992, 54.

⁷ J. H. RAPAR, *Filsafat Politik Aristoteles*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 1993, 33.

⁸ *Ibid.*, 34.

⁹ *Ibid.*

Dalam hal ini, ada sesuatu tujuan yang paling tinggi hendak dicapai yakni kebaikan tertinggi bagi manusia. Negara mengupayakan dan menjamin kebaikan yang semaksimal mungkin bagi warganya. Persekutuan tersebut terbentuk karena banyaknya kebutuhan yang tidak sanggup dipenuhi sendiri. Terbentuknya negara itu terjadi dalam proses perkembangan persekutuan hidup yang sesuai dengan kodratnya.¹⁰

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang dapat menjalankan kehidupannya hanya dalam kebersamaan. Maka, sebagai komunitas atau warga negara yang hidup dalam kebersamaan perlu berperan serta dalam urusan masyarakat, bahwa ia harus berani memikul tanggung jawab demi kemajuan masyarakat dalam sebuah komunitas atau negara. Bagaimana seorang warga negara mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas publik, seperti mengatur urusan komunitas, dan bagaimana pemerintahan harus dibentuk dan kekuasaan politik dilaksanakan.¹¹

Bagi Aristoteles, warga negara merupakan orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang memerintah dan diperintah sewaktu-waktu akan mengalami pergantian peran.

¹⁰ J. H. RAPAR, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, 172.

¹¹ YOSEF KLADU KOTEN, *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, Ledalero, Maumere 2010, 6.

Setiap warga negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam aktivitas-aktivitas publik. Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan atau kebajikan. Seorang warga negara harus memiliki kemampuan untuk memerintah dan diperintah dengan baik.¹² Bagi Aristoteles, sebagai warga negara harus berperan aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara. Warga negara diharapkan untuk sanggup memainkan peran dalam kehidupan bernegara baik menjadi pemimpin atau dipimpin.

Peran dan fungsi setiap warga negara berbeda-beda. Aristoteles menggambarkan warga negara bagaikan para pelaut yang sedang bertugas di sebuah kapal. Dalam melaksanakan tugas mereka, ada yang bertindak sebagai jurumudi, pendayung, pengawas dan lain-lain. Meskipun, mereka berbeda fungsi dan peranan, ada satu tujuan bersama yang hendak dicapai yakni bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran kapal.¹³

Sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah negara perlu merealisasikan secara penuh potensinya. Dengan kata lain, karena manusia secara alamiah politis, mereka dapat memenuhi potensi alamiahnya dan menjadi bahagia hanya dengan menjadi anggota komunitas politis dan berperan secara aktif di dalamnya. Lewat peran serta dalam berpolitik, manusia memanfaatkan kemampuan distingtifnya, yakni akal budi dan berbicara.¹⁴

¹² ARISTOTLE, *The Politics, Op. Cit.*, 181.

¹³ J. H. RAPAR, *Filsafat Politik Aristotele, Op. Cit.*, 75.

¹⁴ YOSEPKLADU KOTEN, *Partisipai Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles, Op. Cit.*, 11.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan selalu terjadi hubungan saling tergantung antar individu dalam masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara mengambil bagian dalam aktivitas-aktivitas publik, seperti mengatur urusan komunitas dan bagaimana pemerintahan harus dibentuk dan kekuasaan politik dilaksanakan. Bagi Aristoteles, politik tidak hanya mencakup aktivitas politis saja, tetapi semua lini kehidupan sosial. Dia mau menunjukkan bahwa pentingnya warga negara untuk berperan aktif dalam politik untuk membangun sebuah tatanan negara demi mencapai kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

Pada zaman Yunani klasik, pengertian politik sangat erat kaitannya dengan semua aktivitas yang berlangsung dalam *polis* (negara-kota). Politik terkait dengan semua aspek kehidupan manusia dalam *polis*. Semua warga negara diharapkan berperan aktif dan wajib terlibat dalam semua kegiatan bernegara. Terlibat dalam berpikir dan berefleksi bersama, dalam perdebatan rasional dan bertindak berdasarkan kesadaran kritis bersama.

Secara kodrati semua orang terdorong untuk menyelesaikan masalah secara bersama, maka tidak pantas kalau warga negara hanya menjadi objek penentuan beberapa elite. Aristoteles berharap perlu peran serta warga dalam urusan masyarakat, dalam dimensi-dimensi yang terbuka baginya, tanpa tidak mengesampingkan dimensi apa pun. Mereka yang tidak langsung berpolitik tetap

diharapkan memperhatikan apa yang terjadi dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab.¹⁵

Warga negara dalam kehidupan *polis* harus berperan aktif secara keseluruhan. Peran warga negara dalam pemerintahan menjadi sangat fundamental dalam sistem demokrasi Athena sebelum Aristoteles menulis bukunya *The Politics*. Ciri khas pemerintahan demokrasi adalah oleh rakyat dan untuk rakyat, serta hak yang sama bagi semua warga negara untuk memerintah dan diperintah. Seorang warga negara berhak untuk berperan aktif dalam fungsi yudisial dan jabatan-jabatan publik. Sanggup memainkan peran sewaktu-waktu bila diperlukan, menjadi hakim, pejabat pemerintah dan dapat menjadi prajurit.¹⁶

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas, mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan tingkat keyakinan terhadap partai politik menunjukkan bahwa citra politik selama ini 79,6% buruk, 18% baik, 2,45 tidak tahu.¹⁷ Parpol hanya terlarut dalam kepentingan segelintir elitnya. Rakyat menjadi tidak puas terhadap kinerja parpol sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Dari konteks politik tersebut menyebabkan ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah. Warga negara merasa dibohongi oleh calon pemimpin maupun pemimpin untuk memperkuat golongan atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan keadaan masyarakat. Sehingga warga negara pada umumnya cenderung untuk menarik diri dari politik dan

¹⁵ FRANZ MAGNIS SUSENO, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*, Op. Cit., 31.

¹⁶ J. H. RAPAR, *Filsafat Politik Aristoteles*, Op. Cit., 68.

¹⁷ Jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas, *Politik dan Hukum: Jajak Pendapat*, 6 April 2015, 5.

menjadi apatis dalam seluruh aktivitas politik.¹⁸ Akibatnya kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas menjadi luntur.

Peran warga negara dalam politik sangat bergantung pada pemahaman dan penilaian orang akan arti dan makna sebuah aktivitas politik. Pada jaman modern ini peran warga negara dalam politik hanya merupakan salah satu dari sekian banyak aktivitas lain seperti agama, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung dalam sebuah negara. Sebagai sebuah aktivitas terpisah, politik secara sempit dikaitkan dengan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibagi-bagikan di antara sekelompok kecil elite politik. Dalam konteks politik semacam ini, akan terlihat bahwa politik hanya menjadi milik para politikus, sementara sebagian besar masyarakat hanya menjadi *masa mengambang*¹⁹ dan hanya diberi kesempatan menggunakan hak politiknya sekali dalam lima tahun. Sehingga sebagian warga negara menarik diri dari aktivitas politik.²⁰

Ada alasan yang mendasar mengapa warga negara Indonesia menarik diri dari kegiatan politik misalnya dalam kegiatan pemilihan umum. Bagi mereka, pemilu hanya menjadi alat legitimasi penyelenggara negara yang tidak bisa dipercaya. Warga negara mengikuti pemilu hanya akan memperkuat dan memperkokoh kedudukan orang-orang yang secara moral tidak legitim untuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Masa mengambang disini dimaksudkan bahwa, warga negara yang tidak tahu arah politik, digerakan oleh elite politik tertentu untuk mudah terbawa arus politik demi kepentingannya. Warga negara hanya dimintai keterlibatannya pada tahap pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan oleh elite politik. Elite politik melihat warga negara sebagai kerumunan yang mudah dimobilisasi untuk mendukung dan menyukseskan apa yang sudah diputuskannya. Pemahaman tersebut tidak sesuai dengan semangat demokrasi Aristoteles yang mengedepankan keterlibatan penuh warga negara dalam semua urusan kenegaraan, karena demokrasi mengandaikan peran aktif warga negara dalam semua urusan politik. YOSEP KLADU KOTEN, *Op. Cit.*, 5

²⁰ YOSEP KLADU KOTEN, *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*, *Op. Cit.*

memimpin bangsa. Warga negara menjadi pesimis dan apatis dengan pemimpin-pemimpin dan politisi yang hanya mencari keuntungan sendiri dengan manipulasi dukungan warga negara tetapi tidak peduli terhadap kepentingan warga negara Indonesia.²¹

Bertolak dari pemahaman tersebut bahwa Aristoteles tidak mempromosikan penarikan diri dalam politik, menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Karena bagi Aristoteles hanya keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik memungkinkan manusia untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Manusia secara alamiah politis, mereka dapat memenuhi potensi alamiahnya dan menjadi bahagia hanya dengan menjadi anggota sebuah komunitas politis dan terlibat secara aktif di dalamnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana peran warga negara dalam politik menurut Aristoteles. Peran warga negara sebagai masyarakat politis menjadi pendasaran dalam aktivitas berpolitik dalam sebuah negara, khususnya Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang ingin dijawab oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan warga negara oleh Aristoteles?
2. Apa yang dimaksud dengan politik oleh Aristoteles?

²¹ ROBERT P. BORRONG, *Etika Politik Kristen, Serba-serbi Politik Praktis*, Unit Pusat Studi Jakarta dan Pusat Studi Etika Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jakarta 2006, 64.

3. Bagaimana peran warga negara dalam politik menurut Aristoteles?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menguasai lebih dalam konsep pemikiran Aristoteles mengenai peran warga negara dalam berpolitik.
2. Mengetahui relevansi peran warga negara dalam berpolitik menurut Aristoteles dalam *The Politics*.
3. Sebagai syarat menyelesaikan program studi strata satu (S-1).

1.4 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berbagai buku, majalah dan surat kabar sering berbicara tentang bagaimana keterlibatan warga negara dalam berpolitik menjadi acuan dalam penulisan. Penulis menggunakan buku utama yang ditulis oleh Aristoteles, *The Politics* untuk mengupas peran warga negara dalam berpolitik. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa buku penunjang untuk mendukung penyusunan skripsi, tentang peran warga negara dalam berpolitik.

1.5 SKEMA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang alasan pemilihan tema, rumusan masalah tujuan penulisan, metode penulisan, serta skema penulisan.

- Bab II: Biografi

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang riwayat hidup Aristoteles, karya-karya dan pemikiran politiknya secara umum.

- Bab III: Peran Warga Negara dalam Berpolitik menurut Aristoteles

Penulis membahas pada bab ini tentang peran warga negara dalam politik menurut Aristoteles.

- Bab IV: Tinjauan Kritis

Pada bab ini penulis akan menyajikan tinjauan kritis dan relevansi atas pemikiran Aristoteles tentang peran warga negara dalam politik.

- Bab V: Penutup

Pada bagian penutup, penulis merangkum isi pembahasan penulis. Dan pada bagian akhir, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.